

## ABSTRAK

*Presidential threshold* hadir sebagai gagasan untuk memperkuat sistem presidensial yang digunakan di Indonesia, dengan penggunaan dalam jangka waktu yang panjang, diharapkan hadirnya *presidential threshold* dapat meng sederhanakan jumlah partai politik kedepannya. Namun seiring berjalannya waktu, pembahasan *presidential threshold* menjadi ‘panas’, digunakannya sistem Pemilihan Serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, semakin menonjolkan adanya indikasi-indikasi bila *presidential threshold* telah disalahgunakan oleh sejumlah partai politik untuk kepentingannya dalam mempertahankan kekuasaan dipemerintahan. Terjadi konflik politik dalam pembahasan *presidential threshold* yang terjadi pada internal PANSUS hingga berujung pada *votting* pada forum Paripurna dan aksi *walk-out* Fraksi Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan serta pandangan mengenai *presidential threshold* dari sejumlah Fraksi di DPR-RI. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif serta penggunaan sumber data yang berupa hasil wawancara dan Risalah Rapat Paripurna pengambilan keputusan dan pengesahan RUU Pemilu. Penelitian ini akan menjelaskan dinamika konflik serta dampak dari pembahasan *presidential threshold* dalam Pemilihan Serentak pada Undang-Undang Pemilihan Umum. Hasil dari penelitian bahwa Fraksi koalisi pendukung Pemerintah serta Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya dengan melakukan *lobbying* terhadap Fraksi yang berdiri dalam ditengah kepentingan untuk menggunakan *presidential threshold* dan penghapusan *presidential threshold*. Proses resolusi konflik yang dilakukanpun gagal dikarenakan aksi *walk-out* sehingga hasil dari Rapat Paripurna tersebut hanya dirasakan oleh pemenang dalam pembuatan keputusan tersebut.

Kata Kunci : Konflik, Kepentingan, *Presidential Threshold*, Pemilu

## ABSTRACT

*Presidential threshold comes as an idea to strengthen the presidential system that been used in Indonesia, with long-term usage, it is expected that the presence of a presidential threshold can simplify the number of political parties going forward. But over time, the discussion of the presidential threshold became 'hot', the use of the Constituent Selection system based on the 2008 Constitutional Court ruling, further highlighted the indications that the presidential threshold has been abused by a number of political parties for its sake in maintaining governmental power. There was a political conflict in the discussion of the presidential threshold that took place in the internal PANSUS to the end of voting in the plenary forum and the walk-out action of Gerindra, PAN, PKS and Democrat factions. The conflict is caused by differences in interests and views on the presidential threshold of a number of factions in the DPR-RI. By using qualitative-descriptive method and the use of data source in the form of interview result and Plenary Meeting of decision making and ratification of Election Bill. This study will explain the dynamics of the conflict as well as the impact of the discussion of the presidential threshold in the Constituent Elections of the Election Law. The result of the research that the coalition faction supporters of Government and Government try hard to maintain its position by lobbying the fraction standing in the middle of interest to use presidential threshold and elimination of presidential threshold. The conflict resolution process that fails due to walk-out action so that the results of the Plenary Session are only felt by the winner in making the decision.*

*Keywords: conflict, interests, presidential threshold, election*